

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Fraksi menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah Daerah diminta mengevaluasi penurunan pajak daerah dan capaian PAD yang masih di bawah target melalui perbaikan basis data, penagihan potensi pendapatan, dan digitalisasi pemungutan.

Fraksi juga menyoroti berkurangnya anggaran fasilitasi bina mental spiritual dari Rp15,98 miliar menjadi Rp11,72 miliar dan meminta agar pembangunan fisik tetap diimbangi pembangunan moral dan karakter, termasuk perhatian terhadap hibah lembaga keagamaan serta kesejahteraan guru madin, TPQ, dan pondok pesantren. Dalam penanggulangan kemiskinan, kegiatan fisik direkomendasikan untuk diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat rentan. Fraksi turut meminta evaluasi promosi dan pengelolaan pariwisata, percepatan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, penggunaan anggaran secara efektif dan transparan agar tidak menghasilkan SILPA terlalu tinggi, serta percepatan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan setelah Perubahan APBD memperoleh persetujuan DPRD.

Catatan:

- Pendapat Akhir disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 8 September 2026.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan disertai catatan, koreksi, dan rekomendasi.
- Dokumen ditandatangani oleh Sri Khalimah, S.Sos. selaku Ketua Fraksi dan Agung Nur Wahid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 10 halaman termasuk halaman sampul.

Kata Kunci: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Perubahan APBD 2026; Pendapatan Asli Daerah; Pembinaan Keagamaan; Penanggulangan Kemiskinan; Pariwisata; Efektivitas Anggaran

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. FINAL OPINION OF THE UNITED DEVELOPMENT PARTY FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE 2026 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

The United Development Party (PPP) Faction of the Kebumen Regency Regional House of Representatives (DPRD) accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for enactment as a Regional Regulation, subject to several recommendations. The Faction emphasized that every rupiah of public funds should be used appropriately, equitably, and in the broader public interest. The Regional Government was urged to evaluate declining regional tax revenue and Regional Own-Source Revenue performance through improved databases, collection of potential revenues, and digitalized payment systems.

The Faction also highlighted the reduction in the budget for religious and spiritual development facilitation from IDR 15.98 billion to IDR 11.72 billion and called for physical development to be balanced with moral and character development, including support for religious institutions, madrasah diniyah teachers, Qur'anic education centers (TPQ), and Islamic boarding schools. For poverty alleviation, physical development programs should be prioritized in areas with high concentrations of poverty so that their benefits reach vulnerable communities. The Faction also called for the evaluation of tourism promotion and management, accelerated establishment of the Regional Tourism Promotion Board, effective and transparent budget utilization to avoid excessively high year-end budget surpluses (SILPA), and accelerated preparation for implementing programs and activities following DPRD approval of the amended APBD.

Note:

- *The Final Opinion was presented at the Plenary Meeting of the Kebumen Regency DPRD on September 8, 2026.*
- *The United Development Party Faction accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 APBD for enactment as a Regional Regulation, accompanied by its notes, corrections, and recommendations.*
- *The document was signed by Sri Khalimah, S.Sos., as Chair of the Faction, and Agung Nur Wahid, S.H., M.H., as Secretary of the Faction.*
- *The document consists of 10 pages, including the cover page.*

Keywords: *United Development Party Faction; 2026 APBD Amendment; Regional Own-Source Revenue; Religious Development; Poverty Alleviation; Tourism; Budget Effectiveness*